

## Analisis efisiensi pengelolaan Dana Alokasi Umum Kabupaten atau Kota di Pulau Kalimantan

Devi Utami Rika Safitri\*, Agus Widarjono

Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnia dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

\*Corresponding author: [deviutamirs54@gmail.com](mailto:deviutamirs54@gmail.com)

---

**JEL Classification Code:**

E22, E61, E62

**Kata kunci:**

DAU, Efisiensi, DEA, Pulau Kalimantan

**Email penulis:**

[Agus.widarjono@uui.ac.id](mailto:Agus.widarjono@uui.ac.id)

**DOI:**

10.20885/JKEK.vol2.iss2.art15

**Abstract**

**Purpose** – This study aims to analyze the efficiency levels in managing the General Allocation Fund in regencies and cities for the purpose of equalizing financial capacity in the endeavor of human development in Kalimantan Island.

**Methods** – Two testing models, namely Data Envelopment Analysis (DEA) and Panel Data Regression Model, were employed on 56 regencies and cities in Kalimantan Island with the primary variable being the General Allocation Fund absorption reports from 2018 to 2022.

**Findings** – The majority of regencies and cities in Kalimantan Island have managed the General Allocation Fund with relatively high-efficiency levels, ranging from 0.86 to 0.98. Regression analysis indicates that Gross Regional Domestic Product has a significant influence on the regression outcome. On the other hand, Regional Original Revenue exerts a less significant effect, while the Poverty Percentage holds a significant negative impact. The panel test results demonstrate that the Fixed Effect (FE) approach is the most suitable model with a remarkably high R-squared value of 0.990803.

**Implication** – In general, regencies and cities in Kalimantan Island have managed the General Allocation Fund efficiently. However, in a policy context, continuous monitoring and evaluation are necessary to ensure optimal utilization of the DAU in supporting regional development.

**Originality** – This study contributes to the evaluation and formulation of optimum values in managing the General Allocation Fund for regencies and cities in Kalimantan Island.

---

**Abstrak**

**Tujuan** – Menganalisa tingkat efisiensi pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/Kota terhadap Pemerataan Kemampuan Keuangan dalam upaya pembangunan manusia di Pulau Kalimantan

**Metode** – Terdapat dua model pengujian yakni *Data Envelopment Analysis* (DEA) dan Model Regresi Data Panel pada 56 Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan dengan variabel utama laporan penyerapan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2018 sampai 2022.

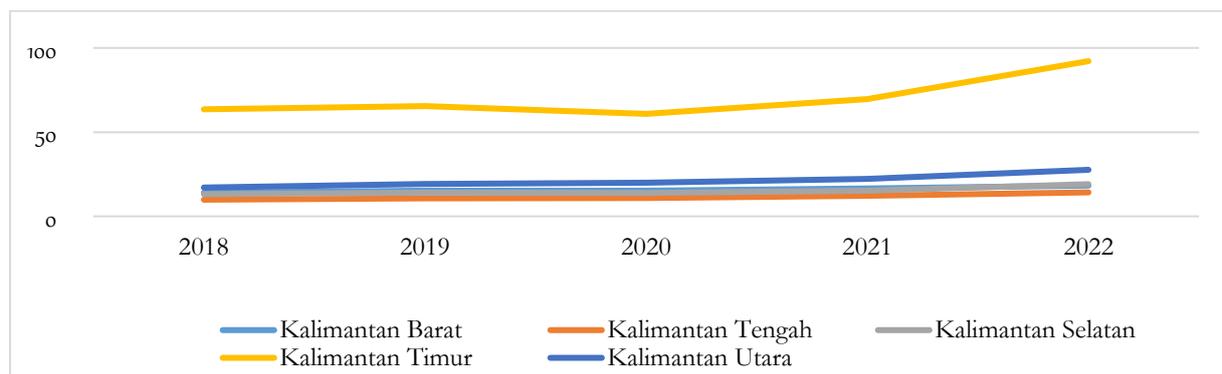
**Temuan** – Sebagian besar kabupaten/kota di Pulau Kalimantan telah mengelola Dana Alokasi Umum (DAU) dengan tingkat efisiensi yang relatif tinggi, berkisar antara 0.86 hingga 0.98. Analisis regresi menunjukkan bahwa PDRB pengaruh signifikan terhadap hasil regresi. Sedangkan, PAD memiliki pengaruh yang kurang signifikan, sementara Persentase Kemiskinan memiliki pengaruh negatif yang signifikan. Hasil uji panel menunjukkan bahwa pendekatan *Fixed Effect* (FE) adalah model terbaik dengan nilai *R-squared* yang sangat tinggi (0.990803).

**Implikasi** – Secara garis besar kabupaten/kota di Pulau Kalimantan telah mengelola DAU secara efisien. Namun, dalam konteks kebijakan, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan penggunaan DAU yang optimal dalam mendukung pembangunan daerah.

**Orisinalitas** – Penelitian ini berkontribusi dalam mengevaluasi dan memformulasikan nilai optimum dalam pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan.

## Pendahuluan

Pulau Kalimantan, sebagai salah satu entitas geografis terbesar di Indonesia yang memegang peran vital dalam kontribusi ekonomi negara. Pada periode 2018 hingga 2022, kondisi ekonomi di pulau ini mengalami dinamika yang patut untuk dievaluasi, terutama terkait dengan pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan dampaknya terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), mengingat bahwa Pulau Kalimantan akan menjadi Ibu Kota Nusantara sehingga perlu mendorong kemajuan di berbagai aspek, termasuk sumber daya manusia. Pada lain sisi, selama lima tahun terakhir, Pulau Kalimantan mengalami sejumlah perubahan signifikan dalam sektor ekonominya. Data statistik menunjukkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang relatif meningkat, mengindikasikan kenaikan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut. Selain itu, sektor-sektor ekonomi utama seperti pertambangan, perkebunan, dan industri juga memainkan peran kunci dalam dinamika ekonomi Kalimantan. Data lonjakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tercermin pada grafik 1 berikut:



Sumber: BPS Indonesia Tahun 2023

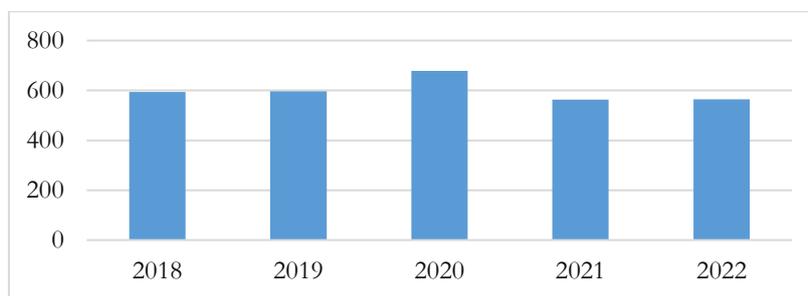
**Grafik 1.** Nilai PDRB Provinsi di Pulau Kalimantan

Berdasarkan grafik 1 menunjukkan bahwa selama periode 2018 hingga 2022, Pulau Kalimantan mencatat pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan di seluruh provinsinya. Kalimantan Timur mencatat pertumbuhan PDRB yang sangat signifikan, melonjak dari 63.54 pada tahun 2018 menjadi 92.14 pada tahun 2022 (Islam, 2023). Kondisi ini tercermin dari aktivitas sektor pertambangan yang besar. Peningkatan PDRB di seluruh provinsi menunjukkan potensi pertumbuhan ekonomi yang kuat di Pulau Kalimantan selama periode tersebut. Sehingga diperlukan analisis lebih mendalam untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di masing-masing provinsi, termasuk sektor-sektor unggulan dan upaya kebijakan yang dilakukan.

Strategi alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dalam konteks otonomi daerah di Indonesia telah menjadi titik fokus penting dalam pengembangan kebijakan publik. Fenomena ini didorong oleh perubahan dinamis dalam kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang memengaruhi distribusi sumber daya keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks desentralisasi, daerah memegang hak dan wewenang yang ditentukan berdasarkan tingkat kewenangan yang telah didefinisikan untuk merencanakan, mengambil keputusan, serta mengelola wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat. Selain itu, tingkat otonomi yang diberikan kepada daerah juga

mempengaruhi kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut. Dengan demikian, ada kewenangan yang tetap berada di tingkat pusat, yang disebut kewenangan absolut, dan ada pula kewenangan yang dialihkan kepada daerah, yang disebut kewenangan konkuren, yang diatur oleh undang-undang (Patarai, 2021).

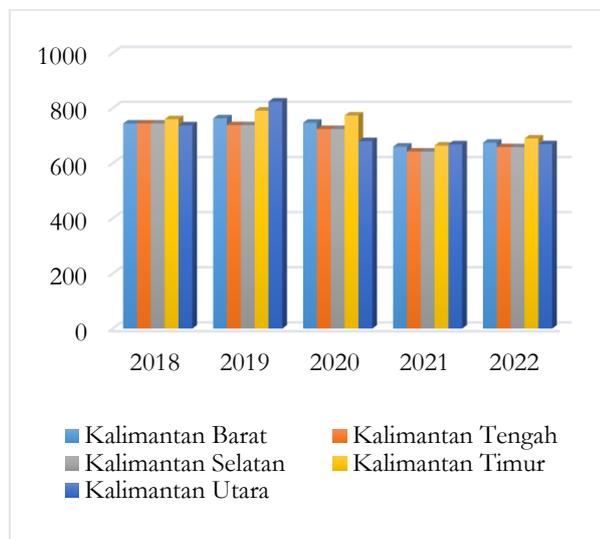
Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dalam urusan Otonomi Daerah dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana pemerintah daerah dapat memenuhi kewajiban keuangannya, termasuk pembayaran gaji pegawai. Faktor internal seperti sumber daya manusia (SDM) dan potensi daerah memiliki dampak signifikan terhadap alokasi DAU. Sedangkan, faktor eksternal seperti kebijakan desentralisasi fiskal dan dukungan dari pihak eksternal seperti swasta dan masyarakat juga memainkan peran penting (Uang, 2018). Dalam mengevaluasi efisiensi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan dijelaskan bahwa efisiensi alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Sari, 2020).



Sumber : DJPK Kemenkeu RI Tahun 2023

**Gambar 1.** Jumlah Rata – Rata Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Secara Nasional

Pada gambar 1 menjelaskan bahwa selama lima tahun terakhir dari 2018 hingga 2022 Dana Alokasi Umum (DAU) telah mengalami fluktuasi yang signifikan. Sejak awal pelaksanaan desentralisasi fiskal hingga saat ini, Dana Alokasi Umum (DAU) tetap menjadi komponen utama dalam pembiayaan otonomi daerah. Ini tercermin dari alokasi anggaran DAU yang signifikan dalam belanja transfer ke daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta proporsi besar alokasi anggaran DAU dalam pendapatan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) paling sedikit sebesar 26 persen dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Neto (Indonesia, 2023).



Sumber: DJPK Kemenkeu RI Tahun 2023

**Gambar 2.** Nilai Rata-rata Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan

Data pada gambar 2 menunjukkan rata-rata realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) di setiap provinsi di Kalimantan selama 2018 hingga 2022. Kalimantan Timur juga mengalami fluktuasi dalam realisasi DAU dari tahun 2018 hingga 2022 yakni terjadi peningkatan signifikan dari tahun 2018 ke 2019. Meskipun mengalami penurunan di tahun 2020, tetapi kembali meningkat di tahun-tahun berikutnya. Fluktuasi dalam realisasi Dana Alokasi Umum di provinsi-provinsi Kalimantan selama lima tahun terakhir dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah, kinerja ekonomi, dan proyek-program tertentu. Evaluasi dan pemantauan terus-menerus diperlukan untuk memastikan alokasi dana yang optimal dan mendukung pembangunan daerah.

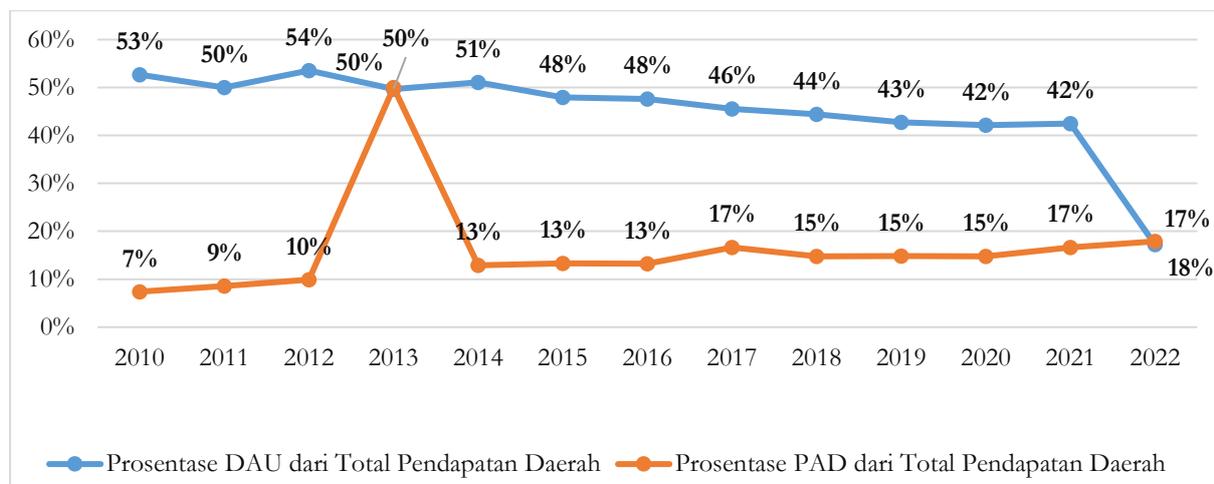
Laporan mengenai peningkatan efektivitas peranan DAU dalam pemerataan kemampuan keuangan antardaerah yang disusun oleh Tim Kajian Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI menyoroti tujuan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan alokasi dana dari APBN ke daerah untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah. Selama periode 2012-2017, tercatat bahwa DAU terus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 8,5 persen setiap tahunnya. Meskipun DAU memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah di sebagian besar wilayah, terdapat variasi besar dalam proporsi penerimaan DAU terhadap total pendapatan daerah. Lebih dari separuh dari 542 daerah menunjukkan proporsi penerimaan DAU di atas 50 persen dari total pendapatan daerah. Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, memiliki proporsi penerimaan DAU terendah, hanya sebesar 3,8 persen, sementara Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, mencapai 73,4 persen. Pada tahun 2017, Provinsi DKI Jakarta tidak mendapat DAU (APBN, 2017).

Kajian ini mengacu pada kajian serupa yang dilakukan sebelumnya bahwa peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) berpengaruh positif terhadap peningkatan belanja daerah (BD) dan dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Bitung Tahun Anggaran 2004-2015 membuktikan terjadinya *Flypaper Effect* (Sumangkut, Kindangen, & Walewangko, 2016). Selain itu, disebutkan juga bahwa Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah positif dan signifikan, sedangkan pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi adalah negatif signifikan (Maulana & Susilowati, 2020). Hal ini diperkuat dengan kajian terbaru yang menyebutkan bahwa DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan DAK dan DBH Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan (Ridho & Wijayanti, 2022).

Dalam desentralisasi fiskal ekualisasi keuangan pusat dan daerah berdasarkan *money follows function* yakni prinsip yang menegaskan bahwa pengalokasian anggaran harus berdasarkan fungsi masing - masing unit dalam organisasi pemerintah. Pemenuhan kebutuhan fiskal daerah didanai oleh *Intergovernmental Fiscal Transfers* (IFT). *Intergovernmental fiscal transfers* (IFT) merupakan ciri dominan keuangan daerah di sebagian besar negara. IFT digunakan untuk memastikan bahwa pendapatan direncanakan sesuai dengan kebutuhan pengeluaran berbagai tingkatan pemerintah daerah (Shah, 2007). Pemanfaatan DAU di tingkat daerah tetap menantang karena bersifat *block grant*. Oleh karena itu, optimalisasi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah dalam menentukan prioritas pembangunan sangat penting dalam meningkatkan nilai DAU. Selain itu, terdapat rekomendasi kebijakan, termasuk penghitungan batas anggaran nasional DAU yang harus mempertimbangkan kemampuan keuangan nasional untuk mendanai DAU serta pemanfaatan DAU yang sebaiknya disalurkan berdasarkan penerimaan nasional aktual untuk mengurangi ketidakpastian dalam pengelolaan anggaran.

Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi memiliki peran krusial dalam meningkatkan kemandirian suatu daerah dalam pengelolaan keuangan. Secara ilmiah, hal ini terjadi karena PAD yang substansial mengurangi ketergantungan daerah pada dana transfer dari pemerintah pusat. Dengan PAD yang mencukupi, daerah memiliki sumber pendapatan yang beragam seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan aset daerah, memungkinkan mereka untuk mengalokasikan dana sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan lokal. Tingginya PAD juga memberikan fleksibilitas dalam mengelola anggaran dan mengurangi risiko terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional atau fluktuasi ekonomi. Inilah yang secara ilmiah menguatkan kemandirian keuangan daerah dan memungkinkan mereka untuk memajukan kualitas

layanan publik, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat (Puspita, Pahlevi, Raharja, & Hadi, 2022)



Sumber: DJPK Kemenkeu RI Tahun 2023

**Grafik 2.** Persentase Perbandingan DAU dan PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah

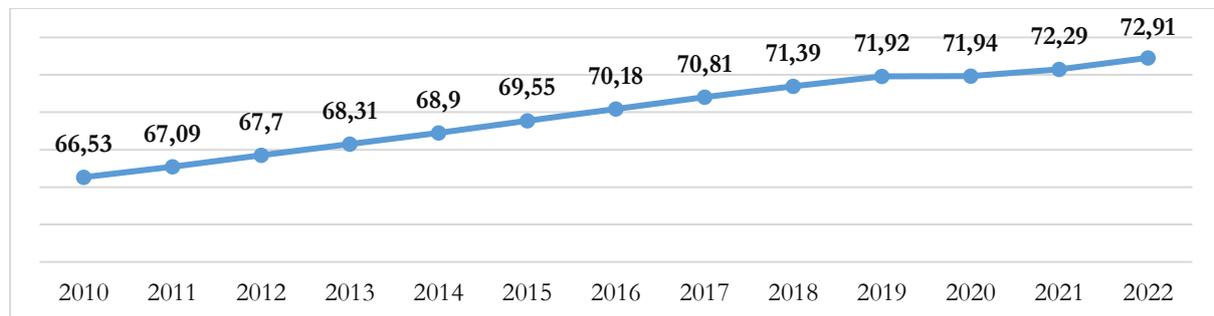
Secara nasional peranan DAU terhadap Total Pendapatan Daerah secara agregat sejak 2010 sampai 2022 masih cukup besar dan cenderung lebih besar dibanding dengan PAD. Meskipun terjadi trend penurunan yakni pada tahun 2022. Dari grafik 2 tersebut menunjukkan bahwa DAU masih mendominasi sebagai sumber utama pendapatan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) di sebagian besar daerah di Indonesia. Sejak 2010 sampai 2022 hampir separoh bahkan lebih dari total pendapatan daerah – daerah di Indonesia bersumber dari DAU. Dengan demikian sebagaimana tujuan DAU tahun 2022 yang ditujukan sebagai upaya pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, seharusnya lebih dari cukup apabila dapat dikelola dan dialokasikan dengan memperhatikan aspek – aspek efisiensi oleh Pemerintah Daerah.

Fenomena *flypaper effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) di Indonesia merujuk pada kecenderungan pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam menghabiskan dana DAU yang mereka terima daripada pendapatan yang mereka peroleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fenomena ini disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk asimetri informasi antara pemerintah pusat dan daerah, ketergantungan pemerintah daerah pada DAU sebagai sumber utama pendapatan, kebijakan pemerintah pusat yang mendorong penggunaan DAU untuk tujuan tertentu, serta kendala dalam meningkatkan PAD di beberapa daerah. Fenomena *flypaper effect* memiliki implikasi signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah, baik positif maupun negatif, tergantung pada bagaimana dana DAU digunakan. Oleh karena itu, penting untuk memantau dan mengendalikan penggunaan dana DAU agar mencapai hasil yang optimal dalam mendukung pemerataan kemampuan finansial antardaerah di Indonesia (Pratiwi & Paramita, 2016).

Adapun terkait dengan pembangunan SDM di Indonesia sebagaimana tujuan DAU yakni mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-daerah, hal – hal yang berkaitan dengan tingkat pendidikan dan ketersediaan layanan kesehatan yang juga menjadi komponen DAU tentu akan memberikan pengaruh secara signifikan. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di level 72,91 pada Oktober 2022, naik 0,86% dibanding tahun lalu. Dengan capaian ini, IPM Indonesia masih berada dalam kategori 'tinggi'. Selama satu dekade terakhir, terjadi trend kenaikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagaimana grafik 3.

Dari perspektif sosial-ekonomi, menjadi ibu kota negara adalah langkah besar yang membutuhkan evaluasi mendalam. Faktor-faktor seperti infrastruktur, aksesibilitas, dan potensi pertumbuhan ekonomi perlu dievaluasi. Kalimantan memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama dalam sektor pertambangan dan perkebunan. Namun, perlu mempertimbangkan juga

dampak sosial seperti distribusi pendapatan, akses layanan kesehatan dan pendidikan, serta ketersediaan lapangan kerja. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan di ibu kota baru dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, serta memastikan keberlanjutan ekonomi dan lingkungan yang seimbang



Sumber: Data BPS Indonesia Tahun 2023

**Grafik 3.** Indeks Pembangunan Manusia Selama 10 Tahun Terakhir

Dengan memperhatikan kondisi - kondisi tersebut, penelitian ini menjadi cukup penting dilakukan untuk melihat tingkat efisiensi peranan pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/Kota terhadap Pemerataan Kemampuan Keuangan dalam upaya pembangunan manusia di Pulau Kalimantan dengan memasukkan variabel – variabel *input* maupun *output* yang relevan dalam pengukuran. Penelitian ini menjadi menarik untuk dikaji karena dilakukan di pulau Kalimantan yang mana notabene pulau ini akan menjadi Ibu Kota Nusantara Indonesia. Selain itu, metode yang digunakan dalam penelitian dapat menjelaskan nilai serta formasi Dana Alokasi Umum yang seharusnya untuk pengelolaan secara efisien dan optimum serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efisiensi dalam pengelolaan DAU dan berikutnya akan menyajikan rumusan rekomendasi kebijakan sebagai bahan evaluasi untuk diimplementasikan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sebagai pemerataan Kemampuan Keuangan Daerah melalui pengelolaan DAU.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data statistik sebagai sumber informasi utama. Alat analisis yang digunakan adalah metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) untuk mengukur tingkat efisiensi. Pendekatan yang digunakan adalah *Variable Return to Scale* (VRS) yang memungkinkan untuk pengukuran jumlah masukan (*input*) dan keluaran (*output*) dalam bentuk kuantitas yang tidak harus sama (CONSULTING, 2013). Sedangkan, uji faktor dilakukan dengan menggunakan metode Regresi Data Panel dengan menerapkan pendekatan *Random Effect Model* (REM). Pendekatan ini digunakan untuk mengestimasi data panel, di mana residualnya memiliki potensi untuk saling berhubungan antar waktu dan individu (Widarjono, 2018).

Objek penelitian adalah Kabupaten/Kota dengan metode pengambilan sampel *purposive sampling* yakni di Pulau Kalimantan. Penelitian mencakup lima provinsi di daerah tersebut, yaitu Kalimantan Barat (12 kabupaten, 2 kota), Kalimantan Tengah (13 kabupaten, 1 kota), Kalimantan Selatan (11 kabupaten, 2 kota), Kalimantan Timur (7 kabupaten, 3 kota), dan Kalimantan Utara (4 kabupaten, 1 kota). Variabel penelitian terdiri dua kategori pengujian yakni uji efisiensi dan uji faktor. Analisis Efisiensi menggunakan data laporan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai variabel *input* dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel *output*. Sedangkan untuk mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi nilai tingkat efisiensi pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU), maka diperlukan analisis regresi data panel. Model persamaan regresi data panel sbb:

$$Efisiensi_{it} = \beta_0 + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 Kemiskinan_{it} + \beta_3 PAD_{it} + e_{it}$$

Pada analisis regresi data panel terdapat tiga estimasi model, yakni Common Effect Model (CEM), Fixed effect model (FEM) dan Random effect model (REM).

## Hasil dan Pembahasan

Terdapat variasi dalam penggunaan DAU pada kabupaten/kota di Pulau Kalimantan dalam lima tahun (2018 hingga 2022), provinsi dengan penggunaan DAU tertinggi adalah Kota Palangka Raya dengan rata-rata 882.94. Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi tingkat penggunaan DAU di masing-masing kabupaten/kota, termasuk tingkat populasi, kebutuhan infrastruktur, sektor ekonomi dominan, dan prioritas pembangunan daerah. Contohnya, kabupaten dengan populasi yang tinggi dan infrastruktur yang belum terdevelop mungkin membutuhkan alokasi DAU yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Penting untuk melakukan analisis mikro di tingkat kabupaten/kota untuk memahami secara mendalam penggunaan DAU. Hal ini melibatkan penelusuran alokasi dana ke program-program atau proyek-proyek spesifik, serta evaluasi dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. Misalnya, alokasi DAU yang digunakan untuk meningkatkan akses pendidikan atau layanan kesehatan mungkin berdampak positif pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

Adapun rata-rata Harapan Hidup (AHH) tertinggi di Pulau Kalimantan berada di Kota Balikpapan (74,489 tahun), Kota Samarinda (74,23 tahun) dan Kota Bontang (74,246 tahun). Sedangkan, rata-rata Harapan Hidup (AHH) terendah di Pulau Kalimantan berada di Hulu Sungai Utara (63,816 tahun), Katingan (65,761 tahun) dan Hulu Sungai Selatan (65,962 tahun). Faktor-faktor yang mempengaruhi AHH meliputi akses terhadap layanan kesehatan, tingkat pendidikan, sanitasi, kondisi lingkungan, dan faktor-faktor ekonomi. Sedangkan pada aspek pendidikan melalui nilai Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tertinggi di Pulau Kalimantan berada di Kota Banjar Baru (10,985 tahun), Kota Balikpapan (10,867 tahun) dan Kota Bontang (10,807 tahun). Sedangkan, nilai Rata-rata Lama Sekolah (RLS) terendah di Pulau Kalimantan berada di Kayong Utara (6,001 tahun), Sekadau (6,848 tahun) dan Sambas (6,726 tahun).

Rata-rata Pengeluaran Per Kapita (PP) masyarakat pada kabupaten/kota di pulau kalimantan tertinggi berada di Kota Bontang (Rp 16,782.2 M), Kota Balikpapan (Rp 14,842.8 M) dan Kota Banjar Baru (Rp 13,827.8 M). Sedangkan, rata-rata Pengeluaran Per Kapita (PP) terendah berada di Nunukan (Rp 7,112 M), Tana Tidung (Rp 7,712.2 M) dan Mahakam Hulu (Rp 7,840.4 M). Kondisi ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, ketersediaan lapangan kerja, struktur ekonomi, dan tingkat inflasi. Wilayah-wilayah dengan PP tinggi cenderung memiliki tingkat pendapatan rata-rata yang lebih tinggi dan lapangan kerja yang lebih stabil. Sehingga, perlu dilakukan pengembangan sektor-sektor ekonomi lokal yang memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat menjadi kunci. Selain itu, perlu dilakukan diversifikasi ekonomi dengan memperkuat sektor-sektor ekonomi non-unggulan serta memperkuat promosi untuk menarik investasi dan pariwisata ke wilayah tersebut, menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

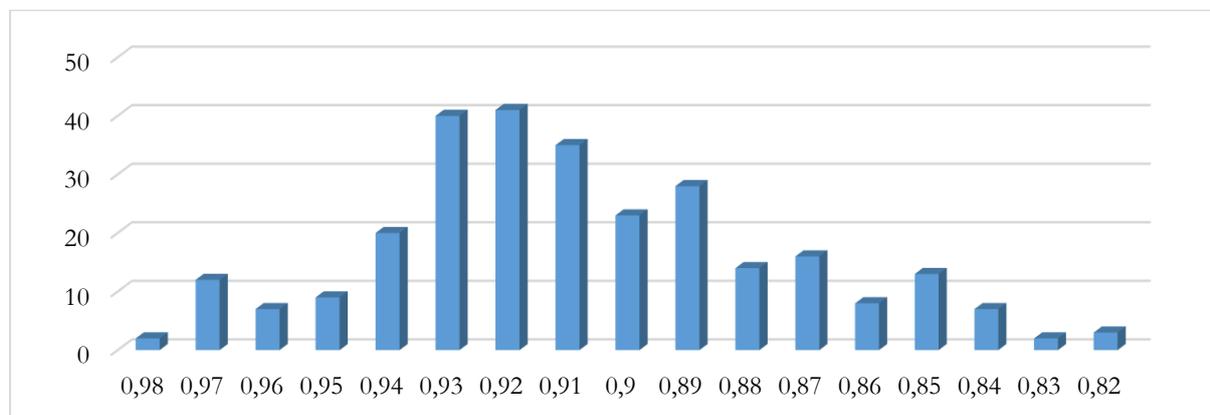
Pada Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan daerah penting dalam rencana pemindahan ibu kota Indonesia. Dalam hal ini, kondisi sosial-ekonomi dan tantangan adalah krusial untuk memastikan keberhasilan transisi ini. Pendapatan per kapita di Penajam Paser Utara cenderung naik seiring tahunnya. Pada tahun 2018, Pendapatan Per Kapita di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah 11.492. Kemudian, pada tahun 2019, terjadi kenaikan menjadi 11.750. Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan menjadi 11.231. Pada tahun 2021, Pendapatan Per Kapita mengalami kenaikan lagi menjadi 11.651, dan pada tahun terakhir yang tercatat, yaitu 2022, mencapai 11.890. Meskipun angka ini belum mencapai rata-rata nasional, pertumbuhan yang positif adalah indikator baik untuk potensi pembangunan ekonomi.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan menjadi catatan penting bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Mengingat bahwa wilayah ini akan menjadi Ibu Kota Nusantara nantinya. Data menunjukkan bahwa nilai rata – rata Prosentase Kemiskinan (P0) tertinggi di Pulau Kalimantan berada di Mahakam Hulu (11.552%), Melawi (12.14%) dan Landak (11.072%). Sedangkan, nilai rata – rata Prosentase Kemiskinan (P0) terendah di Pulau Kalimantan berada di Kota Balikpapan (2.594%), Banjar (2.76%) dan Kota Banjar Baru (4.214%). Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi tingkat pendidikan, lapangan kerja, akses kesehatan, dan tingkat harga-harga kebutuhan pokok. Wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi mungkin membutuhkan intervensi ekonomi dan sosial yang lebih besar. Peningkatan akses

pendidikan untuk menyediakan pendidikan berkualitas guna meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja. Didukung dengan dorongan investasi dan pengembangan sektor-sektor ekonomi yang dapat menciptakan lapangan kerja. Selain itu, mendorong program-program pengentasan kemiskinan yang disesuaikan dengan karakteristik setiap wilayah. Selain itu, perlu dilakukan pembentukan dan penguatan jaringan sosial untuk memberikan bantuan kepada kelompok rentan. Kebijakan-kebijakan ini perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah. Dengan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan sektor terkait, diharapkan tingkat kemiskinan di Kalimantan dapat terus menurun menuju kesejahteraan yang lebih baik.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata tertinggi di Pulau Kalimantan berada di Kota Balikpapan 718.4 miliar rupiah, Kota Samarinda: 572.938 miliar rupiah dan Kutai Kartanegara: 496.334 miliar rupiah. Sedangkan, rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) terendah di Pulau Kalimantan berada di Tana Tidung 18.046 miliar rupiah, Mahakam Hulu: 20.93 miliar rupiah dan Nunukan: 119.53 miliar rupiah. Tingkat pendapatan asli daerah mencerminkan potensi ekonomi dan daya beli masyarakat di suatu wilayah. Wilayah-wilayah dengan pendapatan tinggi mungkin memiliki sektor ekonomi yang kuat, sementara wilayah-wilayah dengan pendapatan rendah memerlukan stimulan ekonomi untuk pertumbuhan.

Rata-rata Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi di Pulau Kalimantan berada di Kutai Kartanegara 178.178 triliun rupiah, Kutai Timur 145.0154 triliun rupiah dan Kota Balikpapan 109.093 triliun rupiah. Sedangkan, rata-rata Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terendah di Pulau Kalimantan berada di Mahakam Hulu 2.8274 triliun rupiah, Kayong Utara 4.3302 triliun rupiah dan Sukamara 4.579 triliun rupiah. PDRB mencerminkan total nilai ekonomi suatu wilayah. Wilayah dengan PDRB tinggi cenderung memiliki basis ekonomi yang kuat, sementara wilayah dengan PDRB rendah mungkin memerlukan stimulus ekonomi. Diperlukan optimalisasi dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada untuk meningkatkan kontribusi terhadap PDRB. Selain itu, penguatan investasi sektor swasta untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi didukung dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk mendukung pertumbuhan sektor-sektor berpotensi.



Sumber: Data diolah tahun 2023

**Gambar 3.** Nilai efisiensi pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU)

Data gambar 3 menunjukkan nilai efisiensi pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) di berbagai kabupaten/kota di beberapa provinsi di Pulau Kalimantan selama lima tahun (2018 hingga 2022). Tren umum menjelaskan bahwa mayoritas kabupaten/kota memiliki nilai efisiensi DAU di kisaran 0.86 hingga 0.98. Hal ini menunjukkan tingkat efisiensi yang relatif tinggi dalam pengelolaan dana publik. Pada Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa Kota Bontang memiliki nilai efisiensi stabil sekitar 0.97 hingga 0.98 selama lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bontang telah efektif dalam mengelola DAU. Kota Samarinda memiliki nilai efisiensi sekitar 0.96 hingga 0.97. Meskipun tidak se-tinggi Kota Bontang, tetapi masih menunjukkan pengelolaan DAU yang baik. Paser dan Berau juga memiliki nilai efisiensi yang relatif tinggi di kisaran 0.94

hingga 0.96. Hal ini menunjukkan upaya yang baik dalam mengelola DAU di kabupaten-kabupaten ini.

Pada Provinsi Kalimantan Utara memiliki nilai efisiensi sekitar 0.91 hingga 0.97. Meskipun terjadi fluktuasi, Malinau masih menunjukkan usaha yang signifikan dalam mengelola DAU. Selain itu, Tana Tidung juga memiliki nilai efisiensi yang relatif tinggi di kisaran 0.91 hingga 0.93, menunjukkan upaya yang baik dalam pengelolaan dana publik dan pada Kota Tarakan memiliki nilai efisiensi yang sedikit lebih rendah tetapi tetap di kisaran 0.92 hingga 0.93, menunjukkan konsistensi dalam pengelolaan DAU. Distribusi efisiensi pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Pulau Kalimantan telah memanfaatkan dana publik secara efektif.

**Tabel 1.** Hasil Estimasi untuk Keseluruhan Model (*Common Effect, Fixed Effect dan Random Effect*)

Var.	Common Effect (CE)				Fixed Effect (FE)				Random Effect (RE)			
	Coef.	Std. Error	t-Stat.	Prob	Coef.	Std. Error	t-Stat.	Prob	Coef.	Std. Error	t-Stat.	Prob
C	0.876095	0.016735	52.35154	0	0.909745	0.005754	158.0931	0	0.905589	0.007021	128.9893	0
LOG(PAD)	0.000643	0.003146	0.204527	0.8381	0.002174	0.000949	2.289491	0.023	0.001834	0.000932	1.96852	0.05
PDRB	0.000274	$7.07 \times 10^{-5}$	3.879202	0.0001	0.000179	$3.02 \times 10^{-5}$	5.901535	0	0.000182	$2.95 \times 10^{-5}$	6.18422	0
P0	0.003606	0.000864	4.174801	0	-0.00268	0.000749	-3.578553	0.0004	-0.001755	0.000692	-2.535241	0.0118
	R-squared		0.146241		R-squared		0.990803		R-squared		0.14223	
	Adjusted R-squared		0.136961		Adjusted R-squared		0.988389		Adjusted R-squared		0.13290	
	Prob(F-statistic)		0		Prob(F-statistic)		0		Prob(F-statistic)		0	

Sumber: Data Diolah Tahun 2023

Pada model *Common Effect* (CE), variabel konstan (C) memiliki nilai koefisien 0.876095 dengan standar error 0.016735. Statistik t-nya adalah 52.35154, dengan probabilitas mendekati nol. Hal ini menunjukkan bahwa variabel konstan sangat signifikan dalam mempengaruhi hasil regresi. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh yang kurang signifikan terhadap hasil regresi, karena probabilitasnya sekitar 0.8381 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05. Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil regresi, karena probabilitasnya sekitar 0.0001 yang jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05. Variabel Persentase Kemiskinan (P0) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil regresi, karena probabilitasnya mendekati nol.

Pada model *Fixed Effect* (FE), variabel konstan (C) memiliki nilai koefisien 0.91 yang menunjukkan bahwa ada pengaruh positif yang kuat. Statistik t yang sangat tinggi dan probabilitas yang mendekati nol menunjukkan bahwa variabel ini sangat signifikan secara statistik. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai koefisien positif (0.002174) menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan variabel dependen. Statistik t sekitar 2.29 dan probabilitas sekitar 0.023 menunjukkan bahwa variabel ini signifikan secara statistik, meskipun tidak sekuat variabel C. Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki nilai koefisien positif (0.000179) menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara PDRB dan variabel dependen. Statistik t yang tinggi (5.901535) dan probabilitas nol menunjukkan bahwa variabel ini sangat signifikan secara statistik. Variabel Persentase Kemiskinan (P0) memiliki nilai koefisien negatif (-0.00268), menunjukkan adanya hubungan negatif dengan variabel dependen. Statistik t yang negatif (-3.578553) dan probabilitas yang mendekati nol menunjukkan bahwa variabel ini signifikan secara statistik.

Pada model *Random Effect* (RE), variabel konstan (C) memiliki nilai koefisien 0.91, ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif yang kuat. Statistik t yang sangat tinggi dan probabilitas yang mendekati nol menunjukkan bahwa variabel ini sangat signifikan secara statistik. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai koefisien positif (0.001834) menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan variabel dependen. Statistik t sekitar 1.97 dan probabilitas sekitar 0.05 menunjukkan bahwa variabel ini signifikan secara statistik, meskipun tidak sekuat variabel C. Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki

nilai koefisien positif (0.000182) menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara PDRB dan variabel dependen. Statistik t yang tinggi (6.18422) dan probabilitas nol menunjukkan bahwa variabel ini sangat signifikan secara statistik. Variabel Persentase Kemiskinan (P0) memiliki koefisien negatif (-0.001755), menunjukkan adanya hubungan negatif dengan variabel dependen. Statistik t yang negatif (-2.535241) dan probabilitas yang mendekati nol menunjukkan bahwa variabel ini signifikan secara statistik. Hasil analisis model *Random Effect* (RE) menunjukkan bahwa semua variabel memiliki pengaruh statistik yang signifikan terhadap variabel dependen. Variabel PDRB memiliki pengaruh terkuat, diikuti oleh variabel konstan (C), PAD, dan Persentase Kemiskinan (P0). Perlu dicatat bahwa variabel persentase kemiskinan adalah satu-satunya variabel dengan pengaruh negatif.

Adapun analisis uji *R-squared* yang mengukur seberapa baik variabel independen menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Semakin tinggi nilainya, semakin baik modelnya dengan data. Pada FE, *R-squared* sangat tinggi (0.990803) menunjukkan bahwa variabel independen dengan baik menjelaskan variasi dalam variabel dependen. *Adjusted R-squared* memperhitungkan jumlah variabel independen dan jumlah observasi. Pada FE dan RE, nilainya juga sangat tinggi, menunjukkan bahwa model ini sesuai dengan data dengan baik. Probabilitas dari *F-statistic* mendekati nol pada semua model (CE, FE, dan RE), menunjukkan bahwa setidaknya satu variabel independen secara signifikan mempengaruhi variabel dependen. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel PDRB dan Persentase Kemiskinan (P0) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil regresi. Variabel PAD memiliki pengaruh yang kurang signifikan. Variabel konstan C juga memiliki pengaruh yang kuat dalam model ini. Model dengan FE memberikan hasil yang sangat baik dengan *R-squared* yang sangat tinggi. Dalam model RE, hasilnya juga baik tetapi dengan *R-squared* yang sedikit lebih rendah.

**Tabel 2.** Hasil Uji Penentuan Model Regresi Panel Terbaik

	Uji Lagrange Multiplier (Common Effect vs Random Effect)			Uji Chow (Common Effect vs Fixed Effect)				Uji Hausman (Fixed Effect Atau Random Effect)			
	Cross-section	Test Hypothesis Time	Both	Effect Test	Statistic	d.f.	Prob	Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Breusch-Pagan	539.456	0.976649	540.4326	Cross-section F	368.979	-	0	Cross-section random	11.16724	3	0.0109
Breusch-Pagan	0	-0.323	0	Cross-section Chi-square	1268.608	55	0				

Sumber: Data Diolah Tahun 2023

Dalam penentuan model regresi panel terbaik, maka perlu dilakukan 3 uji, diantaranya Uji Lagrange Multiplier, Uji Chow dan Uji Hausman. Uji Lagrange Multiplier dengan Pendekatan *Common Effect* (CE) menunjukkan bahwa *Random Effect* (RE) lebih sesuai dibandingkan dengan *Common Effect* (CE). Pada Uji Chow (*Common Effect vs Fixed Effect*) dengan Pendekatan *Fixed Effect* (FE) menunjukkan bahwa *Fixed Effect* (FE) lebih sesuai karena nilai probabilitas sangat rendah (mendekati nol). Pada Uji Hausman (*Fixed Effect* atau *Random Effect*) dengan Pendekatan *Random Effect* (RE) menunjukkan bahwa *Fixed Effect* lebih sesuai karena probabilitasnya cukup rendah (0.0109). *Fixed Effect* (FE) adalah pendekatan terbaik untuk model regresi data panel dalam penelitian ini. Permodelan *Fixed Effect* (FE) lebih baik daripada *Common Effect* (CE) atau *Random Effect* (RE).

## Kesimpulan dan Implikasi

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Pulau Kalimantan telah mengelola Dana Alokasi Umum (DAU) dengan tingkat efisiensi yang relatif tinggi, berkisar antara 0.86 hingga 0.98. Hal ini menandakan tata kelola keuangan publik yang baik di tingkat kabupaten/kota. Pada Provinsi Kalimantan Timur, Kota Bontang menonjol dengan efisiensi stabil sekitar 0.97 hingga 0.98 selama lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bontang efektif dalam mengelola DAU. Kota Samarinda juga mempertahankan tingkat efisiensi yang baik, berkisar antara 0.96 hingga 0.97. Kabupaten Paser dan Berau juga menunjukkan upaya yang baik dengan efisiensi di kisaran 0.94 hingga 0.96. Provinsi Kalimantan Utara juga menunjukkan usaha

yang signifikan dalam mengelola DAU, terlihat pada Kabupaten Malinau dan Tana Tidung memiliki efisiensi relatif tinggi, berkisar antara 0.91 hingga 0.93. Kota Tarakan, meskipun dengan sedikit efisiensi yang lebih rendah, tetap konsisten dalam pengelolaan DAU dengan tingkat efisiensi 0.92 hingga 0.93.

Analisis regresi menunjukkan bahwa PDRB pada Kabupatena/Kota di Pulau Kalimantan memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil regresi. Sedangkan, PAD memiliki pengaruh yang kurang signifikan, sementara persentase kemiskinan memiliki pengaruh negatif yang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan penanggulangan kemiskinan memiliki dampak penting pada efisiensi pengelolaan DAU. Hasil uji panel menunjukkan bahwa pendekatan *Fixed Effect* (FE) adalah model terbaik pada penelitian ini dengan nilai *R-squared* yang sangat tinggi (0.990803). Kondisi ini menunjukkan bahwa variabel independen dengan baik menjelaskan variasi dalam variabel dependen atau dengan kata lain *Fixed Effect* (FE) memodelkan data dengan sangat baik.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Pulau Kalimantan telah mengelola DAU secara efisien, dan faktor-faktor seperti manajemen keuangan yang baik, transparansi, dan partisipasi masyarakat memainkan peran penting dalam mencapai tingkat efisiensi yang tinggi. Dalam konteks kebijakan, perlu terus menerus dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan penggunaan DAU yang optimal dalam mendukung pembangunan daerah. Selain itu, fokus pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dan penanggulangan kemiskinan akan menjadi kunci untuk mempertahankan dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan DAU di seluruh Pulau Kalimantan. Berdasarkan hasil analisis tingkat efisiensi pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pembangunan Manusia di Pulau Kalimantan, maka dirumuskan beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah pusat dan daerah, diantaranya:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan aksesibilitas ke pendidikan berkualitas di seluruh Kalimantan. Diperlukan investasi dalam fasilitas pendidikan, pelatihan guru, dan program beasiswa untuk memastikan bahwa setiap warga memiliki kesempatan yang setara untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.
2. Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di seluruh Kalimantan. Ini termasuk investasi dalam infrastruktur kesehatan, pelatihan tenaga kesehatan, dan program-program pencegahan penyakit.
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan di Kalimantan. Hal ini dapat dilakukan melalui pembangunan infrastruktur, dukungan terhadap sektor ekonomi lokal, dan insentif untuk investasi swasta.
4. Mengimplementasikan program-program pengentasan kemiskinan yang terfokus dan efektif di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Diperlukan strategi yang terkoordinasi untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan dan membantu mereka mengembangkan keterampilan untuk meningkatkan penghidupan mereka. Implementasikan program-program khusus untuk mengurangi tingkat kemiskinan di daerah dengan Prosentase Kemiskinan (P0) tinggi.
5. Mendorong diversifikasi ekonomi di Kalimantan dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan potensi industri lainnya. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan memungkinkan pemerintah daerah untuk membiayai program-program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara mandiri.
6. Memastikan bahwa alokasi DAU disesuaikan dengan kebutuhan riil di setiap daerah di Kalimantan. Pemerintah dapat melakukan evaluasi terkait dengan distribusi DAU untuk memastikan bahwa dana ini digunakan secara efektif dan efisien. Didukung dengan adanya pengukuran dan pemantauan kinerja, dalam implementasi sistem pengukuran dan pemantauan kinerja yang baik untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan memberikan dampak positif yang diinginkan. Adopsi praktik terbaik dari kabupaten/kota yang telah berhasil dalam mengelola DAU dengan efisien, seperti Kota Bontang dan Kota Samarinda.

7. Mendorong kerjasama yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Kalimantan. Diperlukan koordinasi yang baik untuk memastikan bahwa kebijakan dan program-program pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik di seluruh wilayah. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan. Partisipasi aktif masyarakat akan memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan benar-benar memenuhi kebutuhan dan aspirasi mereka.
8. Serta mempertimbangkan kebijakan yang berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam untuk menjaga lingkungan dan mendukung ekonomi yang berkelanjutan

## Daftar Pustaka

- APBN, T. K. (2017). Peningkatan Efektivitas Peranan DAU Dalam Pemerataan Kemampuan Keuangan Antardaerah. Jakarta: Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Consulting, A. S. (2013). Mengukur Tingkat Efisiensi Dengan Data Envelopment Analysis (DEA): Teori Dan Aplikasi (Edisi Pertama). Jawa Barat: SMART Publishing.
- Indonesia, P. P. (2023). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah. Dari Database Peraturan BPK: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/256399/pp-no-37-tahun-2023>
- Islam, I. H. (2023). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2018-2022. Dari Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/publication/2023/06/14/99ca8a81cd97e69dc04a31bc/produk-domestik-regional-bruto-kabupaten-kota-di-indonesia-2018-2022.html>
- Maulana, F. A., & Susilowati, D. (2020). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau), Pajak Daerah, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011-2017. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 4(1), 130-139. Dari <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jie/article/view/9600>
- Patarai, M. I. (2021). Desentralisasi Kebijakan Dalam Otonomi Daerah. *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*, 1(11), 1406-1417. Dari <https://greenpublisher.id/>
- Pratiwi, D. R., & Paramita, R. (2016). Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Indonesia. *Jurnal Budget*, 1(1), 208-224. Dari <https://ejurnal.dpr.go.id/index.php/jurnalbudget/article/download/97/85/116>
- Puspita, D., Pahlevi, M., Raharja, Y. M., & Hadi, S. (2022). Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia. Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dari [https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/buku/file/1661139200\\_buku\\_dua\\_dekade\\_desentralisasi\\_fiskal.pdf](https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/buku/file/1661139200_buku_dua_dekade_desentralisasi_fiskal.pdf)
- Ridho, M. A., & Wijayanti, D. (2022). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*, 1(1), 71-81. doi:10.20885/JKEK.vol1.iss1.art7
- Sari, M. d. (2020). Analysis of General Allocation Fund Efficiency and Regional Original Income on The Financial Performance of City Governments in Province Aceh. *Jurnal of Malikusaleh Public Unimal*, 3(1), 27-36. Dari [http://ojs.unimal.ac.id/index.php/ekonomi\\_public](http://ojs.unimal.ac.id/index.php/ekonomi_public)
- Shah, A. (2007). INtergovernmental Fiscal Transfers Principles and Practice. (Vol. 13). (R. Boadway, & A. Shah, Eds.) Washington, DC: Library of Congress Cataloging-in-Publication Data. doi:10.1596/978-0-8213-6492-5
- Sumangkut, E. Y., Kindangen, P., & Walewangko, E. N. (2016). Analisis Pengaruh Dana Alokasi

Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Belanja Daerah. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 18(2), 56-72. Dari <https://www.neliti.com/publications/116525/analisis-pengaruh-dana-alokasi-umum-dau-dan-pendapatan-asli-daerah-pad-terhadap>

Uang, A. B. (2018). Strategi Pengalokasian Dana Alokasi Umum. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*, 5(2), 129–143. Dari <https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/download/418/246/>

Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertasi Panduan Eviews* (Kelima ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.